

ANALISIS TIPOLOGI KEMISKINAN PERKOTAAN

Studi Kasus di Jakarta Utara



Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan bagian pokok dalam pembangunan dari kebanyakan negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Sampai dengan sekarang ini, sudah berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dikembangkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebelum merencanakan suatu program atau kebijakan tersebut, sebagai dasarnya penelitian kemiskinan mendalam diperlukan.

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya jumlah daerah perkotaan, kemiskinan di daerah perkotaan merupakan hal yang menarik untuk digali. Dilihat dari akar permasalahan dan perspektif kebijakan untuk mengatasinya, kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) mempunyai permasalahan yang kompleks. Tipologi kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang lebih beragam dan juga implikasi kebijakannya yang cukup rumit. Pada tahun 2007 ini BPS melakukan analisis tipologi kemiskinan perkotaan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik khusus yang terdapat di tiga wilayah konsentrasi kemiskinan perkotaan, baik di pemukiman kumuh, bantaran sungai, maupun di daerah pesisir.

Penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya penelitian ini. Kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Desember 2007
Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Rusman Heriawan
NIP. 340003999

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. Kajian Literatur	5
2.1. Definisi Kemiskinan	5
2.2. Metode Penghitungan Kemiskinan	6
2.2.1. Badan Pusat Statistik	6
2.2.2. Pendataan Sosial Ekonomi	7
2.2.3. Program Keluarga Harapan	8
2.3. Kemiskinan Perkotaan dan Kemiskinan Pedesaan	10
2.4. Indikator Kemiskinan Perkotaan	12
2.5. Analisis Kemiskinan Perkotaan	16
2.6. Tipologi Kemiskinan Perkotaan	17
III. Metodologi	19
3.1. Metode Penelitian	19

3.1.1.	Penyusunan Kuesioner	19
3.1.2.	Rancangan Sampel	21
3.1.3.	Pengambilan Sampel dan Waktu Penelitian	21
3.2.	Metode Pengolahan Data	22
3.3.	Metode Analisis Data	22
3.3.1.	Kerangka Pikir dan Tahapan Analisis	23
3.3.2.	Analisis Deskriptif	27
3.3.3.	Analisa Diskriminan	27
3.3.4.	Analiisa Skala Likert	29
IV.	Hasil dan Pembahasan	30
4.1.	Karakteristik Umum Rumah Tangga Miskin Perkotaan	30
4.2.	Perbedaan Tipologi Kemiskinan Perkotaan	37
4.3.	Tipologi Kemiskinan Perkotaan	39
4.4.	Prioritas Bantuan Langsung	39
4.5.	Prioritas Kebutuhan Rumah Tangga Miskin	42
V.	Kesimpulan	43
	DAFTAR PUSTAKA	49
	LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan momok dari kebanyakan negara berkembang, sehingga penurunan angka kemiskinan merupakan agenda utama dalam perencanaan pembangunan di negara-negara tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dikembangkan untuk menurunkan angka kemiskinan sejak masa pemerintahan Soeharto (1965-1998) sampai sekarang. Dua program pengentasan kemiskinan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yoedhoyono (2005-sekarang) adalah Progam Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006 dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2007. Kedua program tersebut mempunyai kemiripan dimana penanganan masalah kemiskinan dilakukan dengan memberikan bantuan secara langsung dengan kriteria-kriteria tertentu pada program BLT dan bantuan langsung bersyarat pada PKH. Terlepas berhasil tidaknya kedua program tersebut, penelitian kemiskinan mendalam diperlukan sebelum merencanakan suatu program atau kebijakan tertentu.

Penelitian tentang kemiskinan yang ada saat ini lebih banyak membahas definisi kemiskinan, metodologi penghitungan kemiskinan dan analisis kemiskinan secara umum, dimana sebagian besar terfokus pada analisis kemiskinan deskriptif secara nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau konsumsi berdasarkan harga-harga komoditi tertentu. Penelitian seperti ini tentunya sulit jika menghadapi permasalahan kemiskinan yang lebih spesifik. BPS sendiri sangat jarang melakukan penelitian mendalam tentang kemiskinan. Sampai saat ini yang rutin dilakukan BPS setiap tahun adalah melakukan penghitungan kemiskinan dan analisa deskriptif untuk kemiskinan perkotaan dan pedesaan untuk nasional, propinsi

dan kabupaten/kotamadya, dengan menggunakan metode pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana datanya diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sementara analisis kemiskinan lainnya antara lain adalah Studi Kriteria Penduduk Miskin (2000), Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya (2002), dan Pemetaan Kemiskinan (2004).

Menganalisa lebih mendalam permasalahan kemiskinan, misalkan kemiskinan di daerah perkotaan, merupakan hal yang menarik untuk digali. Kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Dibandingkan dengan kemiskinan pedesaan yang lebih banyak merupakan kemiskinan struktural, maka tipologi kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang lebih beragam dan tentunya implikasi kebijakannya akan semakin rumit. Tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitis (*social fragmentation*). (Moser, Gatehouse and Garcia, 1996). Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena yang multi dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi. Kemiskinan perkotaan sering dicirikan sebagai deprivasi kumulatif yaitu satu dimensi kemiskinan sering menjadi penyebab atau penyulut dari dimensi kemiskinan lainnya. (Puguh B. Irawan, 2003).

Pada tahun 2007 ini BPS melakukan analisis tipologi kemiskinan perkotaan dengan membagi rumah tangga miskin ke dalam tiga lokasi kantong kemiskinan, yaitu daerah kumuh/*slum area*, daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data kualitatif dengan menanyakan perspektif dan pendapat kepala rumah tangga miskin terhadap dimensi kemiskinan sehingga kebutuhan dan prioritas sesungguhnya yang diinginkan penduduk miskin untuk merubah nasibnya dapat diketahui. Hasil pendataan tersebut kemudian dianalisa dengan tujuan untuk melihat tipologi rumah tangga miskin di perkotaan dan melihat apakah ada perbedaan tipologi berdasarkan lokasi/domisili rumah tangga miskin, yang pada akhirnya dapat digunakan baik oleh masyarakat, pihak akademis dan terutama pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat di perkotaan.

Pengentasan kemiskinan tidak selalu diatasi dengan pemberian bantuan seperti dua program pemerintah terakhir. Pengentasan kemiskinan akan lebih efisien dan efektif jika penduduk miskin dapat lebih diberdayakan untuk mengubah nasibnya sendiri, tentunya dengan dukungan kebijakan pemerintah.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan tipologi kemiskinan di daerah perkotaan berdasarkan tiga lokasi/daerah kantong kemiskinan dan melihat apakah ada perbedaan tipologi di tiga lokasi tersebut.
2. Menganalisis tipologi kemiskinan di perkotaan berdasarkan ketiga lokasi tersebut.
3. Memberikan saran dalam kebijakan dan program pengentasan kemiskinan perkotaan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Studi ini mencakup dimensi kemiskinan perkotaan yang terdiri dari 9 karakteristik rumah tangga miskin di perkotaan. Sumber data yang digunakan dalam analisis tipologi kemiskinan perkotaan tahun 2007 ini adalah hasil survey Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan tahun 2007 (STKP-07). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 rumah tangga miskin dari kerangka sampel Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE-05) di tiga lokasi kantong kemiskinan, yaitu daerah kumuh, daerah bantaran kali dan daerah pesisir di kotamadya Jakarta Utara. Sementara untuk kotamadya Semarang, Makassar dan Banjarmasin karena keterbatasan dana hanya dilakukan pengamatan lapangan dengan sampel sebanyak 10 rumah tangga miskin pada masing-masing kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan analisis tipologi kemiskinan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup dan Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II. Kajian Literatur, menyajikan berbagai tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kemiskinan secara umum dan kemiskinan perkotaan.
3. Bab III. Metodologi, terdiri dari: Metodologi Penelitian, Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data.
4. Bab IV. Hasil Penghitungan dan Pembahasan, yang terdiri dari analisis tipologi kemiskinan perkotaan baik secara umum maupun berdasarkan lokasi serta saran dalam kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan.
5. Bab V. Kesimpulan dan Penutup.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan dapat diterangkan ke dalam beberapa terminologi seperti, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya kemiskinan relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan. Dalam menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan pokok minimum (BPS, 2005). Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut ini berguna dalam menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan yaitu US \$ 1 per hari atau US \$ 2 per hari.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Yang dimaksud tidak menguntungkan di sini karena tatanan sosial yang tidak adil sehingga melanggengkan kemiskinan. Tatanan kehidupan ini yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. (Soetandyo Wignyosoebroto, 1995). Indikator kemiskinan ini sebenarnya bisa dikurangi dan dihilangkan secara bertahap dengan mengabaikan adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

2.2 Metode Penghitungan Kemiskinan di Indonesia

2.2.1 Badan Pusat Statistik

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS sejak tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SuSeNas). Selanjutnya pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan.

Secara ringkas tahapan penghitungan penduduk miskin adalah sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran riil penduduk nasional (pedesaan dan perkotaan) dengan deflator harga yang dibayar kelompok penduduk marjinal, yaitu 20% penduduk yang berada sedikit di atas perkiraan garis kemiskinan (biasa disebut *reference population*). Dalam tahap ini pengeluaran riil penduduk antar propinsi dibakukan terhadap propinsi DKI Jakarta. Dengan melakukan hal ini diharapkan dapat mengeliminasi faktor perbedaan harga antar propinsi.

2. Dari tahap 1 diperoleh distribusi penduduk menurut pengeluaran riil nya.
3. Selanjutnya adalah mengidentifikasi komoditi di setiap propinsi berdasarkan pada pola konsumsi *reference population* di masing-masing propinsi. Dari komoditi terpilih tersebut akan diperoleh garis kemiskinan makanan dan non makanan.
4. Terakhir adalah menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan menggunakan metode *Head Count Index*.

2.2.2 Pendataan Sosial Ekonomi 2005

Data kemiskinan yang dihitung oleh BPS adalah data makro yang merupakan perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai tingkat propinsi dan kabupaten. Sementara Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE-05) dilakukan dengan tujuan mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang berisi nama kepala rumah tangga miskin dan alamat tempat tinggal mereka. Data ini akan digunakan oleh pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana setiap rumah tangga miskin akan diberikan bantuan sebesar 100.000 rupiah per bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

Berbeda dengan penghitungan BPS maka penghitungan kemiskinan dengan PSE-05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga (*non-monetary approach*). Indikator yang digunakan dalam menentukan status kemiskinan tersebut terdiri dari 14 variabel yaitu, luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, penerangan yang digunakan, bahan bakar yang digunakan, frekuensi makan dalam sehari, kebiasaan membeli daging/ayam/susu, kemampuan membeli pakaian, kemampuan berobat ke puskesmas/ poliklinik, lapangan

pekerjaan kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga dan kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga miskin adalah dengan menggunakan sistem skoring dimana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot yang didasarkan pada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga miskin dari hasil PSE-05 dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{RTM} = \sum W_i X_i$$

Dimana:

W_i = Bobot variabel, $\sum W_i = 1$

X_i = Nilai skor variabel terpilih (skor 1 miskin, skor 0 tidak miskin)

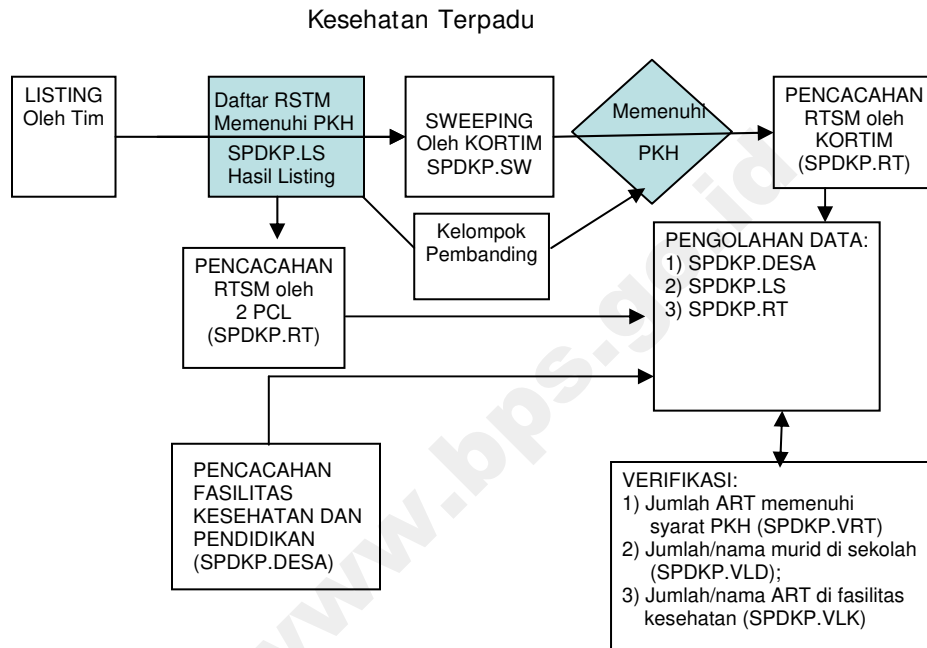
I_{RTM} = Indeks rumah tangga miskin, dengan nilai antara 0 dan 1

2.2.3 Program Keluarga Harapan

Berdasarkan studi yang dilakukan 56 perguruan tinggi ternyata data kemiskinan mikro hasil PSE-05 dinilai mengandung kesalahan yaitu kesalahan inklusi (*inclusion error*) sebesar 8 persen dan kesalahan eksklusi (*exclusion error*) sebesar 22 persen. Yang disebut kesalahan eksklusi adalah kesalahan memasukan rumah tangga yang tidak layak menerima BLT. Sedangkan kesalahan inklusi adalah kesalahan tidak memasukan rumah tangga yang layak menerima BLT. Oleh karena itu mulai tahun 2007 s/d 2009 kembali dilakukan pengumpulan data kemiskinan mikro melalui Survei Pendidikan Dasar Kesehatan Terpadu (SPDKP). Data SPDKP diharapkan bebas kesalahan (*zero error*), baik kesalahan cakupan (kesalahan inklusi dan eksklusi)

maupun kesalahan karakteristik (kesalahan penulisan seperti nama, alamat dan lain-lain). Dari hasil survei ini diharapkan nantinya didapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang akan menerima Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini merupakan program perlindungan sosial dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan publik. Mekanisme pendataan SPDKP dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Mekanisme Pendataan Survei Pendidikan Dasar



Perbedaan PKH dengan PSE-05 adalah terletak dari kriteria rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan langsung dan jenis bantuannya. Jika pada PSE-05 bantuannya merupakan bantuan langsung uang tunai dengan kriteria penentuan rumah tangga miskin berdasarkan 14 kriteria. Maka pada PKH bantuannya merupakan

bantuan tunai bersyarat, dimana rumah tangga sangat miskin yang akan menerima bantuan ini harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria: Ada ibu hamil berumur 10-49 tahun
Ada bayi atau anak balita
Ada anak usia SD/SLTP berumur 5-17 tahun
2. Syarat: Memeriksa kesehatan ibu hamil
Memperhatikan kecukupan gizi anak
Menyekolahkan anak usia sekolah

2.3 Kemiskinan Perkotaan dan Kemiskinan Pedesaan

Berdasarkan daerah tempat tinggal penduduk miskin maka kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan pedesaan (*Rural Poverty*) dan kemiskinan perkotaan (*Urban Poverty*). Jika kemiskinan pedesaan cenderung merupakan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, maka kemiskinan perkotaan dapat didefinisikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh berbagai dimensi (multi dimensi). Kemiskinan kota mempunyai warna tersendiri bila dibandingkan dengan kemiskinan desa, karena kompleksitas kemiskinan kota yang terdapat pada individu atau kelompok masyarakat miskin di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan desa. Contoh, tingginya persaingan hidup, beragamnya aktivitas penduduk kota, tuntutan agar dapat *survive*, dan sebagainya di kota lebih beragam dibandingkan di desa.

Beberapa dimensi di dalam kemiskinan perkotaan meliputi tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, dan ketidak berdayaan. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada masing-masing dimensi:

1. Dimensi rendahnya tingkat pendapatan disebabkan oleh; ketergantungan pada ekonomi uang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, ketidak pastian prospek pekerjaan, ketidak

mampuan mempertahankan pekerjaan dan kurangnya akses terhadap kesempatan kerja.

2. Dimensi kondisi kesehatan buruk disebabkan oleh: kondisi hidup yang kumuh-padat dan tidak higienis, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat karena polusi, bahaya lingkungan seperti banjir, air pasang dan longsor, risiko yang tinggi terhadap penyakit karena buruknya kualitas air, udara dan sanitasi.
3. Dimensi tingkat pendidikan rendah disebabkan oleh: terhambatnya akses terhadap pendidikan karena daya tampung sekolah yang terbatas, ketidakmampuan membayar uang sekolah, buku dan seragam, dan risiko keselamatan/keamanan ketika pergi ke sekolah.
4. Dimensi kerawanan/ketidakamanan tempat tinggal dan pribadi disebabkan oleh: menyewa atau membangun rumah di tanah sengketa atau tanah ilegal, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian keluarga dan keragaman sosial dan ketimpangan pendapatan yang tampak jelas di kota-kota.
5. Dimensi ketidakberdayaan disebabkan oleh: tidak adanya kepastian terhadap status tempat tinggal dan prospek pekerjaan, isolasi dari komunitas yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, kurangnya sumber informasi untuk memperoleh pekerjaan dan untuk mengetahui hak individu dalam mengakses pelayanan.

Selain itu kemiskinan perkotaan juga mempunyai satu ciri khusus yaitu lokasi mereka tinggal. Mayoritas penduduk miskin di kota bertempat tinggal di tiga jenis wilayah atau daerah di kota yaitu daerah kumuh (*slum area*), daerah bantaran kali (*riverside area*), dan daerah pesisir (*seaside area*). Alasan mengapa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di ketiga lokasi tersebut adalah, karena wilayahnya relatif sesuai dan mudah untuk ditempati dengan kondisi kemiskinan yang serba kekurangan. Berbekal aset atau uang seadanya dan bahkan barang-barang bekas (seng, papan, dan sebagainya) mereka dengan mudah membangun rumah ala kadarnya di daerah-daerah tersebut.

Daerah kumuh atau *slum area* merupakan daerah padat penduduk dengan bentuk dan letak rumah yang tidak tersusun rapi. Biasanya daerah ini terletak di pusat kota, terminal, stasiun kereta api, sepanjang rel kereta api, pasar tradisional atau di seputar pabrik-pabrik. Di daerah ini karakteristik rumah tangga miskin sangatlah heterogen. Ini dapat dilihat dari beragamnya lapangan usaha, perilaku (*social capital*), dan bentuk rumah. Perumahan di daerah ini sangat rentan terhadap bahaya kebakaran dan penggusuran.

Daerah bantaran kali atau *river side area* merupakan daerah padat penduduk dengan bangunan rumah yang sering kali berada di atas sungai. Daerah ini banyak ditempati oleh penduduk miskin karena tanah di sepanjang bantaran kali biasanya belum dikembangkan oleh pemerintah kota, sehingga seperti tanah tak bertuan. Penduduk miskin biasanya memulai membangun rumah ala kadarnya, tapi lama-kelamaan menjadi bangunan permanen. Padahal menurut aturan tata kota, sudah jelas tertulis bahwa daerah sepanjang bantaran kali tidak diperuntukan untuk pemukiman atau dilarang untuk membangun rumah atau bangunan permanen apapun. Perumahan di daerah ini sangat rentan terhadap tanah longsor dan banjir.

Daerah pesisir pantai atau *seaside area* merupakan wilayah yang berada di pantai, muara dan seputar pelabuhan. Sebagian besar penduduk miskin yang tinggal di daerah ini adalah nelayan dan buruh pelabuhan sehingga karakteristik rumah tangga miskin di daerah ini tidak seheterogen daerah kumuh. Perumahan di daerah ini sangat rentan terhadap air pasang dan gelombang besar (tsunami).

2.4 Indikator Kemiskinan Perkotaan

Indikator kemiskinan perkotaan sangat diperlukan dalam penghitungan kemiskinan perkotaan. Berkaitan dengan permasalahan yang sangat kompleks maka diperlukan berbagai indikator yang harus memperhatikan beberapa dimensi/faktor. J. Hentzel and R. Seshagiri

(2000) dalam, “ The City Poverty Assessment Primer” menyarankan beberapa indikator yang dikelompokkan ke dalam 4 dimensi kemiskinan perkotaan yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Kemiskinan Perkotaan Hentzel and Seshagir.

Dimensi	Indikator
Pendapatan	Angka kemiskinan Kesenjangan kemiskinan Keparahan kemiskinan Ketimpangan pendapatan
Kesehatan dan Pendidikan	Angka kematian anak usia bawah 5 tahun Angka kematian anak Angka kematian ibu Angka harapan hidup Angka kekurangan gizi anak-anak Angka melek huruf Lama sekolah
Akses	Air, listrik, sanitasi, pembuangan sampah Sekolah dan fasilitas kesehatan Pelayanan sosial Kepuasan pelayanan
Non pendapatan	Pengangguran Kekerasan Pekerja anak-anak Diskriminasi

Sementara *Baharaoglu and Kessides* (2002) dalam “ *Urban Poverty* “ menyarankan indikator kemiskinan perkotaan yang mirip seperti indikator *Hentzel and R. Seshagir*. Mereka membagi beberapa indikator kemiskinan perkotaan menjadi 5 dimensi dimana masing-masing dimensi terdiri dari *intermediate indicator* dan *Impact/Outcome indicator*. Indikator tersebut secara lengkapnya dapat dilihat dari tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kemiskinan Perkotaan *Baharaoglu and Kessides*

Dimensi	Indikator	Indikator Akibat/hasil
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap kredit - Kontribusi pekerja informal - Kontribusi pengeluaran RT terhadap sewa rumah - Model kontribusi perjalanan menuju tempat kerja - Kontribusi pengeluaran RT untuk transport - Rata-rata waktu perjalanan menuju tempat kerja - Akses terhadap listrik - <i>Regulatory delays</i> - Kontrol pengembangan lahan - <i>Coverage of social assistance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Poverty headcount</i> - Kesenjangan kemiskinan - Kemiskinan kronis - Kepala RT wanita - Ketimpangan pendapatan (<i>gini ratio</i>) - Kuantil tingkat ketimpangan - Angka pengangguran - Harga rumah per rata-rata pendapatan
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi pengeluaran RT Pada air dan sanitasi - Persentase RT yang mempunyai air bersih dan saluran pembuangan air - Konsumsi air per kapita - Persentase pengolahan Limbah/air kotor - RT yang mempunyai jadwal pembuangan sampah rutin - Kepadatan - Konsentrasi polusi udara - <i>Shares of sources of household energy</i> - Akses pelayanan kesehatan - Akses mendapatkan gizi yang Layak - Kontribusi pengeluaran RT untuk hidup sehat - Kontribusi pengeluaran RT untuk makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kematian bayi dan anak usia bawah 5 tahun - Angka kematian ibu - Angka harapan hidup pada saat kelahiran - Angka kematian anak usia bawah 5 tahun menurut jenis kelamin - Angka kekurangan gizi anak - Angka kematian dan orang sakit karena penyakit menular - Angka kematian karena kejahatan - Tingkat kematian dan/atau luka karena kecelakaan lalu lintas - Angka kematian karena bencana

*)RT: rumah tangga

Lanjutan

Dimensi	Indikator	Indikator Akibat/hasil
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka partisipasi sekolah dasar dan lanjutan pertama - Akses terhadap pelatihan kejuruan - Kontribusi pengeluaran RT untuk pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf - Angka tamat sekolah - Perbedaan gender dalam keberhasilan pendidikan - Pekerja anak-anak - Anak jalanan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi masyarakat yang memiliki rumah tidak sah - Populasi masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana - Jangkauan (<i>scope</i>) pencegahan bencana - Akses terhadap kepolisian dan proteksi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase RT dengan jaminan kelangsungan pekerjaan - Kematian yang disebabkan oleh bencana lingkungan dan industri - Angka pembunuhan
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan konsultasi Pada masyarakat dalam penentuan anggaran pemkot - Partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan - Diskriminasi dalam mengakses pelayanan/pekerjaan - Akses pada telepon dan internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota - Akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan, <i>performance</i> dan keputusan pemkot. - Kepuasan pada pelayanan pemkot

*)RT: rumah tangga

2.5 Analisis Kemiskinan Perkotaan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas maka analisa kemiskinan perkotaan akan menjadi sangat rumit (*complex*) karena berhadapan dengan permasalahan yang multidimensi. Karena kompleksitas dan biaya yang cukup besar maka biasanya penelitian mengenai kemiskinan perkotaan hanya menargetkan beberapa aspek/faktor dalam kemiskinan perkotaan.

Shengen Fan (2002) melakukan analisa mengenai dampak dari riset pertanian terhadap penurunan kemiskinan perkotaan di India. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa investasi dalam riset pertanian mampu meningkatkan produksi pertanian yang dimana peningkatan itu akan berdampak terhadap penurunan harga makanan/bahan makanan. Hal ini akan menguntungkan penduduk miskin di perkotaan karena mereka biasanya menggunakan 50%-80% dari pendapatannya untuk makanan/bahan makanan. Sehingga penurunan harga makanan akan mengurangi pengeluaran mereka selanjutnya akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan.

Pinelopi K. Goldberg dan *Nina Pavcnik* (2005) melakukan penelitian mengenai efek liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan perkotaan. Analisis terfokus secara eksklusif terhadap daerah perkotaan di Kolombia. Secara metodologi, dilakukan pendekatan keseimbangan parsial untuk mengidentifikasi hubungan antara kemiskinan dengan liberalisasi perdagangan dalam jangka waktu pendek atau menengah. Lebih khusus, difokuskan terhadap efek liberalisasi perdagangan atas kemiskinan perkotaan melalui saluran pendapatan pekerja. Kemudian dilakukan pengujian apakah reformasi perdagangan mengarah kepada perubahan dalam kondisi pekerja dan upah yang diterima dari jangka waktu pendek ke jangka waktu menengah, dimana mungkin dapat mempengaruhi kemiskinan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti dari liberalisasi perdagangan terhadap penurunan kemiskinan perkotaan di Colombia.

2.6 Tipologi Kemiskinan Perkotaan

Analisis tipologi kemiskinan perkotaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan lokasi dan karakteristik atau kondisi kemiskinan di suatu kota tertentu (*Judy Baker and Nina Schuler, 2004*). Sebelum melakukan analisis kemiskinan perkotaan diperlukan pemahaman tipologi kemiskinan perkotaan yang terdiri dari:

1. Konteks perkotaan, dimana yang menjadi perhatian adalah, apa yang menjadi masalah khusus kemiskinan perkotaan.
2. Definisi dan identifikasi. Di sini yang menjadi perhatian adalah, siapa yang miskin dan indikator apa yang digunakan dalam profil kemiskinan perkotaan.
3. Lokasi orang miskin berada, seperti daerah kumuh, daerah bantaran kali dan daerah pesisir.
4. Akses dan kemudahan. Ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah kota mengurangi kemiskinan atau menyumbang kenaikan kemiskinan yang berkaitan dengan kebijakan, lingkungan dan infrastuktur. Kemudian menggambarkan ketersediaan dan kemudahan pelayanan kota terhadap orang miskin. Serta dapat juga mengidentifikasi daerah tertentu yang rentan terasing secara sosial sejalan dengan kurangnya fasilitas pelayanan umum.
5. Karakteristik, kesempatan dan kendala. Ini berkaitan dengan pertanyaan, apa kemiskinan itu alami? Termasuk di dalamnya adalah analisis kerentanan (*vulnerability*), kaitan perkotaan-pedesaan (*urban-rural linkage*) dan persepsi seseorang tentang kemiskinan.

Setelah itu untuk menentukan tipologi kemiskinan perkotaan dikumpulkan data primer (sensus/survey) dan data sekunder (data dari pemerintah kota) dimana informasi yang tercakup dalam ke dua data tersebut adalah:

1. Lokasi, besar dan struktur rumah tangga, demografi, tingkat pendidikan, pola pengeluaran rumah tangga, pekerjaan (status, jabatan, jam kerja), karakteristik rumah (status dan kondisi fisik), dan akses/kualitas/penghasilan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial) yang dipisahkan menurut kelompok pendapatan. Data ini diambil dari sensus atau survey (responden rumah tangga).
2. Belanja pemerintah kota menurut sektor dan lokasi, infrastruktur (jalan raya, instalasi air minum, sekolah, rumah sakit), kesehatan dan status gizi, keberhasilan pendidikan, angka kriminalitas dan kejahatan. Data ini diambil dari data administratif.

<http://www.bps.go.id>

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian Analisa Tipologi Kemiskinan Perkotaan adalah secara survei dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup (*closed questionnaire*) yaitu Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan 2007 (STKP-07) yang dikirimkan kepada responden (*eligible sample*) untuk diisi. STKP-07 memberikan informasi mengenai karakteristik rumah tangga miskin di perkotaan. Metode pengumpulan datanya adalah melakukan wawancara antara petugas pencacah dengan responden.

3.1.1. Penyusunan Kuesioner

Penyusunan pertanyaan pada kuesioner STKP-07 ini didasarkan pada tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data/informasi mengenai tipologi rumah tangga miskin di perkotaan. Kuesioner STKP-07 terdiri dari 5 (lima) blok. Blok I berupa pengenalan tempat; Blok II mengenai keterangan umum rumah tangga, Blok III mengenai prioritas bantuan langsung, Blok IV mengenai Karakteristik kemiskinan perkotaan, dan blok V tentang prioritas kebutuhan rumah tangga. Kuesioner STKP-07 secara lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran.

Karakteristik yang ditanyakan dalam kuesioner di Blok IV merupakan variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini, seperti; aset/kepemilikan/daya beli; pendidikan; kesehatan; perumahan; kebutuhan akan bantuan langsung; kualitas lingkungan tempat tinggal; kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan; akses pelayanan; dan penghargaan dan kepercayaan. Variabel-variabel

tersebut di atas digunakan sebagai rujukan penentuan tipologi kemiskinan kota yang dibedakan menurut daerah kumuh; daerah bantaran kali; dan daerah pesisir.

Kuesioner STKP-07 berisi daftar pertanyaan yang sebagian besar menanyakan persepsi kepala rumah tangga mengenai tipologi kemiskinan di rumah tangga tersebut. Format jawaban menggunakan format tipe Likert (*R.S. Likert, 1932*). Dalam format tipe Likert kuesioner dirancang untuk memungkinkan responden menjawab pertanyaan dalam berbagai tingkatan yang merupakan suatu skala yang mewakili suatu *kontinuum bipolar*. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka rendah) menggambarkan suatu jawaban yang negatif, sedang ujung kanan (dengan angka besar) menggambarkan suatu jawaban yang positif (atau sebaliknya). Kebaikan penggunaan format tipe Likert adalah karena adanya keragaman skor (*variability scorer*) sebagai akibat penggunaan skala. Cara ini memungkinkan responden mengekspresikan tingkat pendapat atau persepsi mereka dalam masalah kemiskinan, sehingga jawaban diharapkan lebih mendekati kenyataan sebenarnya.

Masing-masing pertanyaan dalam kuesioner STKP-07 memberikan pilihan jawaban bertingkat seperti berikut:

1. Tidak punya, punya kondisi buruk, punya cukup baik, punya baik dan punya sangat baik.
2. Sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting dan tidak penting.
3. Tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik
4. Selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

Responden akan memilih jawaban dengan memberikan tanda cek pada kolom pilihan jawaban yang kemudian dalam pengolahan data akan dilakukan penskalaan.

3.1.2. Rancangan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah rumahtangga miskin berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE 05) di Kotamadya Jakarta utara Provinsi DKI Jakarta, kotamadya Semarang Jawa Tengah, kotamadya Makasaar Sulawesi Selatan dan kotamadya Banjarmasin Kalimantan Selatan. Populasi ini merupakan kerangka sampel (*sampling frame*) untuk pemilihan sampel. Teknik penarikan sampelnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sampel target rumah tangga miskin sebagai *eligible respondend*.
2. Membuat kerangka sampel berisikan daftar nama kepala rumah tangga miskin dalam PSE 05 dan diberi nomer urut 1 sampai N.
3. Sampel dipilih dari kerangka sampel dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* dengan simulasi pengacakan angka random dari personal komputer.

3.1.3. Pengambilan Sampel dan Waktu Penelitian

Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan 2007 dilaksanakan di 4 kotamadya pada tiga lokasi kantong kemiskinan yaitu daerah kumuh, daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Jumlah sampel sebanyak 400 rumah tangga miskin diambil dari tiga kecamatan di kota Jakarta Utara. Sementara untuk 3 kota lainnya yaitu, Semarang, Banjarmasin dan Makasar hanya dilakukan pengamatan lapangan dengan kuesioner yang lebih sederhana (Blok I, II, III dan V) dengan responden di masing-masing kota sebanyak 10 rumah tangga miskin.

Waktu penyelesaian penelitian ini dijadwalkan selama 1 (satu) tahun, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007, dengan pelaksanaan lapangannya dilakukan pada bulan Agustus-September.

3.2. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data untuk Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan 2007 dimulai dengan memasukkan data hasil survei ke komputer atau *data entry*. Data yang dientri adalah kode dari jawaban responden. Sehubungan dengan entri data tersebut maka dibuat suatu program entri data untuk pemasukan data dari kuesioner ke komputer. Program entri data dibuat dengan menggunakan paket program CS-Pro versi 11, dan data disimpan dalam file database yang bisa ditransfer kedalam file-file lain seperti *MS-Excel* dan *text-file* sehingga dapat digunakan untuk pengolahan analisis selanjutnya.

Program entri data dibuat dengan memperhatikan kemudahan operator dalam memasukkan data antara lain urutan entri data yang sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada di kuesioner. Selain itu validasi pengisian kode harus dibatasi sesuai dengan kode jawaban yang ada di kuesioner agar meminimalkan kesalahan entri. Jawaban responden pada blok IV (dengan format tipe *Likert*) dilakukan penskalaan 1-5.

Setelah semua data dientri, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program analisa statistik SPSS versi 12.5. Pengolahan data ini meliputi analisa deskriptif, tabulasi, analisis diskriminan (*discriminant analysis*) dan analisis skala *Likert* (*Likert Scale Analysis*). Hasil dari pengolahan data ini menjadi acuan dalam analisa tipologi kemiskinan perkotaan.

3.3. Metode Analisis Data

Analisa tipologi kemiskinan perkotaan dibedakan menurut lokasi, yaitu daerah kumuh; daerah bantaran kali; dan daerah pesisir. Masing-masing lokasi akan dianalisis untuk melihat apakah ada perbedaan tipologi kemiskinan diantara ke tiga lokasi tersebut dan melihat karakteristik unik (*unique typology*) dari masing-masing lokasi, setelah itu akan dicari kesamaan tipologi diantara ke tiga lokasi untuk

menentukan tipologi kemiskinan perkotaan secara umum. Analisanya sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisa deskriptif untuk blok I (P.8) dan blok II yang akan menjadi gambaran umum rumah tangga miskin di perkotaan, sementara blok III-V dilakukan analisa statistik dengan menggunakan analisis diskriminan dan analisis skala Likert.

3.3.1. Kerangka Pikir dan Tahapan Analisis

Kerangka pikir analisis tipologi kemiskinan perkotaan dimulai dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa kemiskinan harus dipertimbangkan dari berbagai dimensi dimana terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan kemiskinan pedesaan. Beberapa karakteristik tersebut adalah:

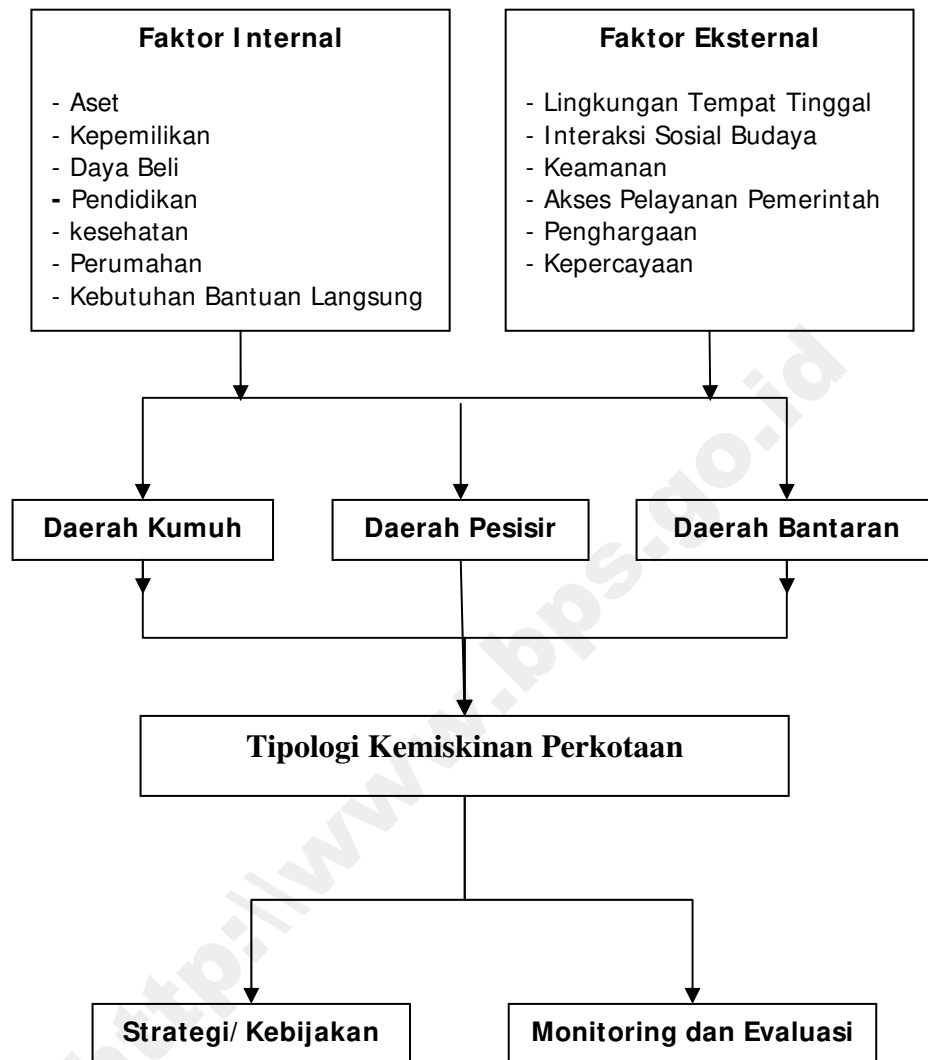
1. Ketergantungan akan uang tunai (*cash economy*). Karakteristik ini menjelaskan bagaimana penduduk di perkotaan sangat tergantung akan uang tunai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Kondisi tempat tinggal yang sangat padat (*overcrowding*). Karakteristik ini menjelaskan bagaimana penduduk di perkotaan yang tinggal di perkampungan yang padat dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak.
3. Resiko lingkungan (*environmental hazards*). Karakteristik ini menjelaskan bagaimana penduduk di perkotaan sangat rentan terhadap resiko lingkungan seperti polusi, kebisingan, pencemaran air, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
4. Kehidupan sosial yang terpecah atau individualistik (*social fragmentation*). Karakteristik ini menjelaskan berkurangnya jaminan sosial dan saling tolong menolong/gotong royong antar warga dan masyarakat sehingga kehidupan mereka cenderung individual.
5. Kriminalitas dan kejahatan (*crime and violence*). Karakteristik ini menjelaskan kerentanan penduduk di perkotaan terhadap kriminalitas, narkoba dan kejahatan.

Selain itu lokasi mereka tinggal diduga mempunyai karakteristik yang berbeda berkaitan dengan dimensi dan karakteristik kemiskinan perkotaan. Mayoritas rumah tangga miskin di kota bertempat tinggal di tiga jenis wilayah atau daerah di kota yaitu daerah kumuh, daerah bantaran kali, dan daerah pesisir. Pemukiman warga di daerah kumuh tekesan rapat-rapat dan kotor dengan fasilitas air bersih, mandi cuci kakus (MCK) dan sanitasi yang kurang memadai. Pemukiman warga di daerah bantaran kali terkesan hampir menyerupai pemukiman di daerah kumuh. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan air kali untuk mandi cuci kakus (MCK). Padahal air kali selain berwarna coklat atau hitam, juga sudah sangat tercemar. Pemukiman di daerah pesisir agak sedikit berbeda dengan pemukiman di wilayah kumuh dan bantaran kali. Di sini, pemukiman justru cenderung tidak padat, tetapi untuk fasilitas air bersih dan MCK sama tidak memadainya dengan kedua daerah lainnya. Kemiskinan yang ada di daerah ini disebabkan karena lapangan usaha nelayan, yang penghasilannya tidak menentu karena tergantung kondisi alam dan jauh dari akses pelayanan ke kota.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas maka kerangka pikir analisis tipologi kemiskinan perkotaan dari STKP-07 dibangun dengan sasaran menentukan profil dan tipologi kemiskinan di perkotaan berdasarkan tiga lokasi penduduk miskin tinggal. Dalam kerangka analisis penelitian ini, karakteristik kemiskinan perkotaan dibagi menjadi dua faktor, yaitu karakteristik yang berasal dari dalam (faktor internal), dan pengaruh dari luar (faktor eksternal). Faktor internal meliputi; aset, kepemilikan, daya beli, pendidikan, kesehatan, perumahan dan kebutuhan akan bantuan langsung. Sementara faktor eksternal meliputi; lingkungan tempat tinggal, interaksi sosial budaya, keamanan, akses pelayanan pemerintah, penghargaan dan kepercayaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian dituangkan ke dalam kuesioner STKP-07.

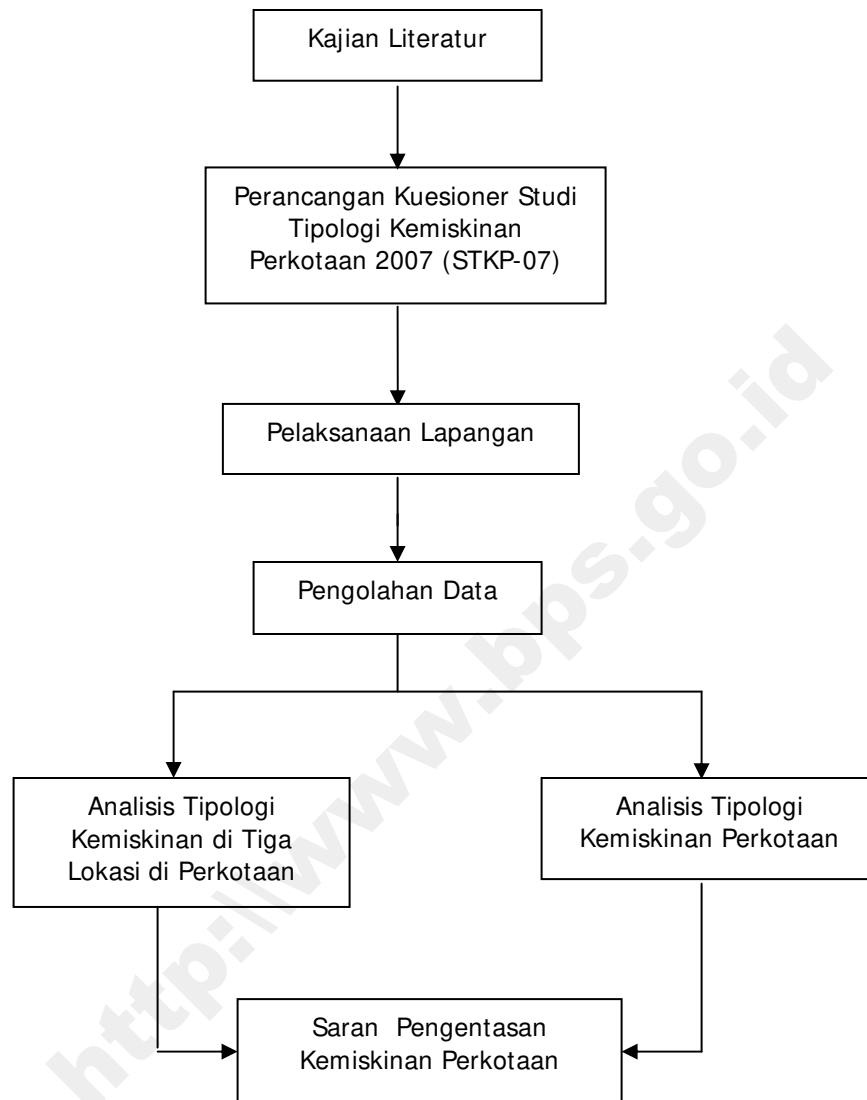
Kerangka pikir analisis tipologi kemiskinan disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan



Sedangkan tahapan analisis tipologi kemiskinan perkotaan disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2 Flowchart Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan



3.3.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis statistik untuk memberi gambaran umum sesuatu yang dibahas. Analisis deskriptif dapat dijelaskan melalui angka-angka statistik maupun menggunakan gambar/grafik dan tabel. Analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang merupakan analisis sederhana tetapi cukup kuat untuk menggambarkan hubungan antar peubah. Sedang analisis deskriptif menggunakan angka statistik, merupakan analisis melalui proses penghitungan statistik tanpa melakukan pengujian statistik untuk memperoleh gambaran obyek yang dibahas.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik umum rumah tangga miskin yang meliputi; jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun (balita) dan 5-17 tahun (usia sekolah), pekerjaan utama, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan utama kepala rumah tangga.

3.3.3. Analisa Diskriminan (*Discriminant Analysis*)

Analisis diskriminan (*Discriminant Analysis*) adalah teknik multivariat yang menggunakan variabel bebas (*dependence variable*) dan variabel tidak bebas (*independence variable*) dengan ciri khususnya adalah variabel tidak bebas harus berupa data kategori sedangkan variabel bebas bisa rasio atau kategori. Secara teknis, analisa diskriminan mirip dengan analisa regresi, hanya berbeda pada jenis data yang digunakan.

Tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar kelompok pada variabel bebas. Jika ada perbedaan akan ditelusuri variabel bebas mana pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Setelah itu membuat fungsi atau model diskriminan yang diikuti dengan melakukan klasifikasi terhadap objek/karakteristik termasuk ke dalam kelompok satu atau kelompok

dua atau lainnya. Dalam penelitian ini kelompok variabel bebasnya adalah lokasi tinggal rumah tangga miskin yaitu daerah kumuh, daerah pesisir dan bantaran kali.

Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan adalah sebagai berikut:

- Variabel bebas berdistribusi Normal (*Multivariate Normality*). Jika tidak berdistribusi Normal akan menyebabkan ketidak tepatan fungsi/model diskriminan.
- Matriks kovarian (*Covariance Matriks*) dari seluruh variabel bebas sama (*equal*).
- Tidak ada korelasi antar variabel bebas (*multicollinearity*).
- Tidak ada data yang sangat ekstrim (*outlier*) pada variabel bebas. Jika data tersebut tetap digunakan akan berakibat kurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi Diskriminan.

Proses dasar dari faktor analisis adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan variabel-variabel menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas.
2. Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan yang pada prinsipnya menggunakan *Simultaneous Estimation* atau *Step-wise Estimation*. *Simultaneous Estimation* adalah metode yang memasukan semua variabel secara bersama-sama kemudian dilakukan proses diskriminan. Sedangkan *Step-wise Estimation* adalah metode dimana variabel-variabel yang ada dimasukan satu per satu ke dalam model. Dalam metode ini da kemungkinan satu atau lebih variabel bebas yang dibuang dari model.
3. Menguji signifikasi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk dengan menggunakan beberapa parameter seperti F test, Wilk"s Lambda dan lainnya.
4. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan

3.3.4. Analisa Skala Likert (Likert Scale Analysis)

Analisa skala Likert adalah teknik analisa yang berkaitan dengan data kualitatif yang datanya berupa skor atau skala. Pada ujung sebelah kiri jawaban diberi skala rendah yang kemudian membesar pada jawaban di sebelah kanan. Dalam kuesioner STKP-07 pilihan jawaban responden pada blok IV.a – blok IV.h dilakukan penskalaan 1-5, dimana jika skala 1 maka jawaban bernilai negatif dan semakin besar skala maka jawaban bernilai positif, kecuali pada Blok IV.i yang skalanya adalah kebalikannya. Negatif dalam konteks ini berarti bahwa pertanyaan pada masing-masing blok IV.a – blok IV.i yang skalanya bernilai 1 atau 2 merupakan ciri atau karakteristik dari kemiskinan perkotaan.

Tujuan dari analisa skala Likert adalah untuk menentukan tipologi mana yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan dengan tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokan (*clustering*) skala Likert 1 – 5 menjadi kluster X yang terdiri dari skala 1 dan 2, kluster Y yang berisi skala 3, dan kluster Z yang terdiri dari skala 4 dan 5. Total seluruh kluster berjumlah 27 kluster.
2. Selanjutnya menghitung jumlah skor ke 27 kluster tersebut dengan menjumlahkan nilai skala pada masing-masing blok IV.a – blok IV.i untuk seluruh responden.
3. Tahap berikutnya adalah mera-ratakan skor yang didapat pada tahap 2 dengan pembagiannya adalah jumlah pertanyaan pada blok yang bersangkutan.
4. Melakukan perbandingan rata-rata skor pada kluster X (yang berisi skala 1-2) diantara blok IV dimana 4 nilai terkecil dari skor tersebut dianggap sebagai tipologi yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan.

Formula penghitungan analisa tipe Likert adalah sebagai berikut:

$$TKP = \text{Min (4) } SL_j, \text{ untuk } j=1,2,3,\dots,9$$

$$SL_j = \frac{\sum_{i=1}^{400} X_i}{n_j}, \text{ untuk } j=1,2,3,\dots,9$$

Dimana:

TKP = Tipologi kemiskinan perkotaan

Min (4) SL_j = Tipologi dengan 4 skor terkecil (minimum)

SL_j = Skor Likert pada tipologi j

X = Kluster skala bernilai 1 dan 2

n_j = Jumlah pertanyaan pada tipologi ke j

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Umum Rumah Tangga Miskin Perkotaan

Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan tahun 2007 (STKP-07) dilakukan secara survei, dengan jumlah responden sebanyak 400 rumah tangga miskin di kotamadya Jakarta Utara yang tinggal di daerah kumuh, bantaran kali dan pesisir. Karakteristik umum rumah tangga miskin perkotaan berdasarkan hasil studi ini adalah sebagai berikut.

Menurut jumlah anggota rumah tangga miskin, maka rata-rata anggota rumah tangga miskin berkisar antara empat sampai dengan lima orang. Sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin yang berusia 0-4 tahun paling banyak hanya satu orang dan rata-rata anggota rumah tangga miskin yang berusia 5-17 tahun berkisar antara satu sampai dengan dua orang. Hal ini ditemukan di semua daerah konsentrasi kemiskinan perkotaan, baik di pemukiman kumuh, bantaran kali, maupun daerah pesisir. Sehingga untuk karakteristik ini dapat disimpulkan tidak ada perbedaan di ketiga lokasi.

Tabel 1. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (ART) Miskin
Menurut Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Rata-rata ART Miskin		
	0-4 Th	5-17 Th	Total
1. Pemukiman Kumuh	0,53	1,98	4,89
2. Bantaran Kali	0,48	1,40	4,34
3. Daerah Pesisir	0,63	1,63	4,98
Total	0,54	1,70	4,75

Untuk ART yang berusia di bawah lima tahun (0-4 tahun) dan ART yang masih termasuk dalam usia sekolah (5-17 tahun), diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah rumah tangga miskin yang memiliki anak usia

0-4 tahun hanya ada sekitar 43 persen, sedangkan rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 5-17 tahun dapat mencapai sekitar 81,7 persen. Jika dilihat menurut daerah konsentrasi kemiskinan, rumah tangga miskin yang paling banyak memiliki anak usia 0-4 tahun berada di daerah pesisir (48,3 persen). Sedangkan rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 5-17 tahun, di ketiga daerah konsentrasi kemiskinan mencapai lebih dari 70 persen dengan persentase tertinggi berada di daerah pemukiman kumuh yang dapat mencapai 93,1 persen (Lampiran 1 dan 2).

Dengan temuan ini mungkin dapat dikatakan bahwa rata-rata anggota rumah tangga miskin di kota Jakarta Utara sudah mengarah kepada pola ideal, yaitu dalam sebuah rumah tangga terdiri dari kedua orang tua (bapak dan ibu) dengan dua atau tiga orang anak. Ada dua kemungkinan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, program pemerintah untuk keluarga kecil sejahtera berhasil. Atau memang rumah tangga miskin di kota Jakarta Utara sudah memahami dan mengerti bahwa dalam memiliki anak mereka juga harus memperhatikan kehidupan si anak mulai sejak dalam kandungan, saat dilahirkan hingga usia sekolah dan menjadi dewasa, dimana tentunya untuk memenuhi semuanya ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga mereka tentunya akan berpikir panjang untuk mempunyai anak banyak.

Melihat gambaran kepala rumah tangga miskin di perkotaan, sebagian besar dari mereka adalah laki-laki (Tabel 2). Di semua daerah konsentrasi kemiskinan perkotaan, lebih dari 75 persen kepala rumah tangganya adalah laki-laki. Daerah pesisir mencapai persentase tertinggi dibandingkan dengan daerah konsentrasi kemiskinan lainnya (88,3 persen). Sedangkan kepala rumah tangga miskin di perkotaan yang perempuan, paling banyak berada di daerah pemukiman kumuh, sebesar 24,4 persen. Seperti diketahui pada umumnya bahwa laki-laki memiliki daya juang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan beratnya tantangan di daerah perkotaan yang memerlukan daya tahan yang kuat untuk dapat tetap bertahan hidup.

Tabel 2. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin
Menurut Jenis Kelamin
di Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Miskin	
	Laki-laki	Perempuan
1. Pemukiman Kumuh	75,6%	24,4%
2. Bantaran Kali	82,5%	17,5%
3. Daerah Pesisir	88,3%	11,7%
Total	81,5%	18,5%

Tabel 3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Kepala Rumah Tangga Miskin
Menurut Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Miskin		
	SD	Sekolah Lanjutan	Universitas
1. Pemukiman Kumuh	62,5%	36,9%	0,6%
2. Bantaran Kali	79,2%	20,0%	0,8%
3. Daerah Pesisir	85,8%	13,3%	0,8%
Total	74,5%	24,8%	0,8%

Tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan kepala rumah tangga miskin pada umumnya adalah Sekolah Dasar (SD), yaitu berkisar lebih dari 60 persen (Tabel 3). Sedangkan tingkat pendidikan tinggi (universitas) yang dicapai hanya berhasil diraih oleh kurang dari 1 persen diantara mereka. Dari gambaran ini jelas terlihat bahwa tingkat pendidikan di kalangan orang miskin kebanyakan hanya pada tingkat rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang berhasil

dicapai oleh kepala rumah tangga miskin mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan rumah tangganya. Dari karakteristik pendidikan kepala rumah tangga ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pendidikan semakin besar resikonya untuk menjadi miskin, demikian juga sebaliknya semakin besar tingkat pendidikan yang dicapai semakin besar peluangnya untuk menjadi lebih tidak miskin atau sejahtera.

Memperhatikan status perkawinan kepala rumah tangga miskin yang menjadi obyek penelitian, terlihat bahwa kebanyakan dari mereka berstatus kawin yaitu mencapai lebih dari 75 persen (Tabel 4). Paling banyak mereka berada di daerah pesisir, yaitu sebesar 82,5 persen. Untuk kepala rumah tangga miskin yang belum kawin, hanya ditemui sedikit sekali. Mereka yang belum kawin, ditemui hanya sebesar 2,5 persen di daerah pesisir. Sedangkan di daerah pemukiman kumuh tidak ditemukan seorangpun kepala rumah tangga miskin yang belum kawin. Untuk kepala rumah tangga miskin yang berstatus cerai, paling banyak berada di daerah pemukiman kumuh (mencapai 23,8 persen). Sedangkan di daerah pesisir hanya mencapai 15,0 persen, dimana angka ini menunjukkan angka yang terkecil diantara ketiga daerah konsentrasi kemiskinan.

Tabel 4. Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Miskin		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
1. Pemukiman Kumuh	0,0%	76,2%	23,8%
2. Bantaran Kali	1,7%	80,8%	17,5%
3. Daerah Pesisir	2,5%	82,5%	15,0%
Total	1,3%	79,4%	19,3%

Untuk keberadaan ibu yang sedang hamil di rumah tangga miskin, diperoleh informasi bahwa mereka hanya ditemui sedikit sekali di ketiga daerah konsentrasi kemiskinan perkotaan (Tabel 5). Jumlah mereka hanya berkisar antara 1,9 persen dan 6,7 persen. Paling banyak mereka ditemui di daerah pesisir dan bantaran kali, sedangkan paling sedikit mereka berada di daerah pemukiman kumuh.

Tabel 5. Persentase Keberadaan Ibu yang Sedang Hamil di Rumah Tangga Miskin Menurut Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Keberadaan Ibu yang Sedang Hamil di Rumah Tangga Miskin	
	Ada	Tidak Ada
1. Pemukiman Kumuh	1,9%	98,1%
2. Bantaran Kali	6,7%	93,3%
3. Daerah Pesisir	6,7%	93,3%
Total	4,8%	95,2%

Dengan demikian, rendahnya keberadaan ibu hamil di rumah tangga miskin perkotaan dapat mengindikasikan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin di perkotaan sudah mulai peduli akan jumlah anggota rumah tangga mereka. Mereka sudah mulai memperhitungkan beratnya beban yang harus dipikul jika memiliki anggota rumah tangga yang cukup besar. Sehingga pada akhirnya mereka kemudian mengatur kelahiran yang terjadi di rumah tangga mereka masing-masing.

Secara keseluruhan, kebanyakan pekerjaan utama kepala rumah tangga miskin adalah sebagai buruh (26,8 persen). Kemudian diikuti mereka yang bekerja sebagai pedagang (10,8 persen), dan mereka yang tidak bekerja mencapai sebesar 8,8 persen (Tabel 6). Kepala rumah tangga miskin yang pekerjaan utamanya sebagai buruh lebih cenderung berada di daerah pemukiman kumuh dan bantaran kali, yaitu masing-masing sebesar 31,9 persen dan 30,8 persen. Pada umumnya mereka bekerja sebagai kuli/buruh di pasar/pusat perbelanjaan dan sebagai buruh

bangunan. Sedangkan kepala rumah tangga miskin yang bekerja sebagai buruh dan tinggal di daerah pesisir, pekerjaan utamanya adalah sebagai kuli angkut pelabuhan (15,8 persen). Untuk kebanyakan pekerjaan utama kepala rumah tangga miskin di daerah pesisir adalah sebagai nelayan, mencapai 22,5 persen.

Selanjutnya pekerjaan utama kepala rumah tangga miskin yang mendominasi adalah berjualan, antara lain mereka yang bekerja dengan membuka warung sendiri yang menjual makanan, seperti nasi uduk, lontong dan makanan kecil lainnya. Selain itu masih banyak pula diantara mereka yang tidak bekerja. Di daerah pesisir dan bantaran kali mereka yang tidak bekerja masing-masing ada sebesar 13,3 persen dan 7,5 persen.

Tabel 6. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan

Daerah Konsentrasi Kemiskinan Perkotaan	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga Miskin			
	1	2	3	4
1. Pemukiman Kumuh	Buruh/kuli (31,9%)	Jual-Beli (14,4%)	Pembantu Rumah Tangga (7,5%)	Lainnya (46,2%)
2. Bantaran Kali	Buruh/kuli (30,8%)	Jual-Beli (10,0%)	Tidak Bekerja, Supir (7,5%)	Lainnya (44,2%)
3. Daerah Pesisir	Nelayan (22,5%)	Buruh/kuli (15,8%)	Tidak Bekerja (13,3%)	Lainnya (48,4%)
Total	Buruh/kuli (26,8%)	Jual-Beli (10,8%)	Tidak Bekerja (8,8%)	Lainnya (53,6%)

Berdasarkan informasi tersebut di atas, terlihat bahwa pada umumnya pekerjaan utama kepala rumah tangga miskin adalah bekerja di sektor informal. Pekerjaan yang dijalani dengan penghasilan yang cukup rendah. Jadi jelaslah bahwa dengan rendahnya penghasilan dapat mengakibatkan kemiskinan.

Rendahnya penghasilan kepala rumah tangga miskin yang tercatat dari penelitian menunjukkan angka maksimum hanya mencapai sekitar Rp. 1,2 juta dalam sebulannya. Angka maksimum yang dicapai ini tercatat diperoleh oleh kepala rumah tangga miskin yang berada di daerah pemukiman kumuh dan bantaran kali. Sedangkan untuk di daerah pesisir, kepala rumah tangga miskin hanya mempunyai penghasilan maksimum sebesar Rp. 1.050.000,-/bulan (Lampiran 3).

4.2. Perbedaan Tipologi Kemiskinan Perkotaan

Dalam analisis perbedaan tipologi kemiskinan perkotaan dilakukan proses pengolahan statistik dengan menggunakan analisis diskriminan. Dengan memperhatikan daerah yang menjadi penelitian kemiskinan perkotaan mencakup tiga daerah konsentrasi kemiskinan, maka pembahasan dilakukan dengan membandingkan satu daerah konsentrasi kemiskinan terhadap satu daerah lainnya. Dengan demikian analisis perbedaan tipologi kemiskinan dilakukan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut antara lain:

1. Perbedaan tipologi kemiskinan antara daerah pemukiman kumuh dengan bantaran kali.

Berdasarkan hasil pengolahan analisis diskriminan diperoleh hasil bahwa terdapat enam variabel yang signifikan sebagai variabel pembeda dari daerah pemukiman kumuh dengan daerah bantaran kali. Keenam variabel tersebut adalah kebutuhan akan bantuan langsung, pendidikan, aset/kepemilikan/daya beli, penghargaan dan kepercayaan, akses pelayanan, dan perumahan (Lampiran 5).

2. Perbedaan tipologi kemiskinan antara daerah pemukiman kumuh dengan daerah pesisir

Variabel yang membedakan tipologi kemiskinan antara daerah pemukiman kumuh dengan daerah pesisir ada lima variabel. Variabel tersebut antara lain kualitas lingkungan tempat tinggal, pendidikan, akses pelayanan, kebutuhan akan bantuan langsung, dan aset/kepemilikan/daya beli (Lampiran 6).

3. Perbedaan tipologi kemiskinan antara daerah bantaran kali dengan daerah pesisir

Terdapat lima variabel yang signifikan untuk membedakan tipologi kemiskinan perkotaan antara daerah bantaran kali dengan daerah pesisir. Kelima variabel yang membedakan tersebut adalah perumahan, penghargaan dan kepercayaan, kebutuhan akan bantuan langsung, aset/kepemilikan/daya beli, dan pendidikan (Lampiran 7).

Dengan memperhatikan ketiga bagian perbedaan tipologi kemiskinan perkotaan seperti tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat tiga variabel yang selalu muncul sebagai variabel pembeda. Variabel tersebut adalah kebutuhan akan bantuan langsung, aset/kepemilikan/daya beli, dan pendidikan.

Dalam kehidupan rumah tangga miskin di ketiga daerah konsentrasi kemiskinan perkotaan, dapat diduga bahwa kebutuhan akan bantuan langsung, aset/kepemilikan/daya beli, dan pendidikan merupakan hal yang paling pokok mempengaruhi diantara variabel lainnya. Selanjutnya dapat dikatakan juga bahwa tingkat keperluan terhadap tiga variabel tersebut berbeda menurut daerah konsentrasi kemiskinan di perkotaan. Dalam hal ini keperluan rumah tangga miskin terhadap bantuan langsung di daerah pemukiman berbeda dengan keperluan mereka yang berada di daerah bantaran kali, demikian pula berbeda dengan keperluan mereka yang berdomisili di daerah pesisir. Pola seperti tersebut berlaku sama terhadap aspek aset/kepemilikan/daya beli dan pendidikan.

4.3. Tipologi Kemiskinan Perkotaan

Analisis tipologi kemiskinan perkotaan dilakukan dengan menggunakan analisa skala Likert. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor pada kelompok skala 1-2 (jawaban bernilai negatif) diantara 9 tipologi kemiskinan perkotaan. Keputusan yang diambil adalah memilih lima nilai terkecil dari skor tersebut. Dari hasil analisa pada tabel 7 diketahui bahwa lima variabel pokok yang menjadi tipologi kemiskinan di daerah perkotaan adalah aset/kepemilikan/daya beli, kebutuhan akan bantuan langsung, perumahan, kualitas lingkungan tempat tinggal, dan pendidikan. Skor Likert secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 7. Di bawah ini.

Tabel 7. Skor Likert Tipologi Kemiskinan Perkotaan

VARIABEL		SKOR LIKERT
A.	Aset/kepemilikan/daya beli	53
E.	Kebutuhan akan bantuan langsung	61
D.	Perumahan	134
F.	Kualitas lingkungan tempat tinggal	223
B.	Pendidikan	380
C.	Kesehatan	504
H.	Akses pelayanan	697
G.	Kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan	716
I.	Penghargaan dan kepercayaan	1.365

4.4. Prioritas Bantuan Langsung

Secara keseluruhan bantuan langsung yang merupakan prioritas utama diinginkan rumah tangga miskin di perkotaan adalah mendapatkan bantuan uang tunai setiap bulan. Diikuti selanjutnya dengan mendapatkan bantuan kebutuhan pokok (bahan pangan) setiap bulan, kemudian mendapatkan bantuan modal usaha.

Jika dilihat menurut daerah konsentrasi kemiskinan perkotaan, diketahui bahwa mendapatkan bantuan uang tunai setiap bulan merupakan prioritas utama. Untuk bantuan langsung berupa kebutuhan pokok (bahan pangan) setiap bulan merupakan prioritas kedua bagi rumah tangga miskin di daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Sedangkan di daerah pemukiman kumuh mendapatkan bantuan kebutuhan pokok (bahan pangan) setiap bulan merupakan prioritas ketiga.

Prioritas bantuan langsung lainnya yang merupakan tiga prioritas utama di masing-masing daerah adalah mendapat modal usaha yang menjadi prioritas ketiga bagi rumah tangga miskin yang berada di daerah pesisir. Mendapat bantuan biaya pendidikan setiap bulan merupakan prioritas kedua bagi rumah tangga miskin yang berada di daerah pemukiman kumuh. Selanjutnya mendapatkan bantuan kesehatan merupakan prioritas ketiga bagi rumah tangga miskin yang berada di daerah bantaran kali.

Tabel 8. Skor Likert Prioritas Bantuan Langsung
Ketiga Daerah Kemiskinan Perkotaan

PRIORITAS BANTUAN LANGSUNG	SKOR LIKERT
Mendpt btn uang tunai setiap bulan	852
Mendpt btn kebutuhan pokok (bahan pangan)	1,463
Mendpt btn modal usaha	1,728
Mendpt btn biaya pendidikan setiap bulan	1,811
Mendpt btn kesehatan	1,881
Mendpt btn biaya fasilitas pendidikan	2,416
Mendpt btn pendampingan usaha	2,833
Mendpt btn sewa rumah	2,982
Mendpt btn gizi balita dan ibu hamil	3,015
Mendpt btn bahan bakar untuk usaha	3,015

Tabel 9. Skor Likert Prioritas Bantuan Langsung Daerah Kumuh

PRIORITAS BANTUAN LANGSUNG	SKOR LIKERT
Mendpt btn uang tunai setiap bulan	349
Mendpt btn biaya pendidikan setiap bulan	586
Mendpt btn kebutuhan pokok (bahan pangan)	635
Mendpt btn modal usaha	751
Mendpt btn kesehatan	781
Mendpt btn biaya fasilitas pendidikan	853
Mendpt btn pendampingan usaha	1,118
Mendpt btn sewa rumah	1,202
Mendpt btn bahan bakar untuk usaha	1,247
Mendpt btn gizi balita dan ibu hamil	1,283

Tabel 10. Skor Likert Prioritas Bantuan Langsung Daerah Bantaran Kali

PRIORITAS BANTUAN LANGSUNG	SKOR LIKERT
Mendpt btn uang tunai setiap bulan	259
Mendpt btn kebutuhan pokok (bahan pangan)	417
Mendpt btn kesehatan	518
Mendpt btn modal usaha	556
Mendpt btn biaya pendidikan setiap bulan	635
Mendpt btn biaya fasilitas pendidikan	771
Mendpt btn sewa rumah	806
Mendpt btn gizi balita dan ibu hamil	869
Mendpt btn pendampingan usaha	875
Mendpt btn bahan bakar untuk usaha	890

Tabel 11. Skor Likert Prioritas Bantuan Langsung Daerah Pesisir

PRIORITAS BANTUAN LANGSUNG	SKOR LIKERT
Mendpt btn uang tunai setiap bulan	244
Mendpt btn kebutuhan pokok (bahan pangan)	411
Mendpt btn modal usaha	421
Mendpt btn kesehatan	582
Mendpt btn biaya pendidikan setiap bulan	590
Mendpt btn biaya fasilitas pendidikan	792
Mendpt btn pendampingan usaha	840
Mendpt btn gizi balita dan ibu hamil	863
Mendpt btn bahan bakar untuk usaha	878
Mendpt btn sewa rumah	974

4.5. Prioritas Kebutuhan Rumah Tangga

Prioritas kebutuhan rumah tangga miskin perkotaan berdasarkan rangking skala Likert dapat dilihat pada tabel 12. Tiga prioritas utama yang dibutuhkan rumah tangga miskin perkotaan adalah kebutuhan akan bantuan langsung, kesehatan, dan perumahan. Sedangkan untuk masing-masing daerah konsentrasi kemiskinan dapat dilihat pada tabel 13 - tabel 15. Terlihat jelas dari ketiga tabel bahwa prioritas kebutuhan bantuan langsung di ketiga daerah konsentrasi kemiskinan relatif sama dengan rangking pertama skala Likert adalah kebutuhan akan bantuan langsung. Sedangkan kesehatan merupakan prioritas ketiga di semua daerah. Selanjutnya yang menjadi prioritas kedua, di daerah pemukiman kumuh adalah pendidikan, di daerah bantaran kali dan di daerah pesisir adalah perumahan.

Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) melalui pendataan sosial ekonomi (PSE) pada tahun 2005 dan bantuan

langsung tunai bersyarat (BLTB) melalui survei pendidikan dasar dan kesehatan terpadu (SPDKP) pada tahun 2007 memang sangat dibutuhkan oleh penduduk miskin terutama penduduk miskin di daerah perkotaan.

Tabel 12. Skor Likert Prioritas Kebutuhan Rumah Tangga Ketiga Daerah Kemiskinan Perkotaan

PRIORITAS KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	SKOR LIKERT
Kebutuhan akan bantuan langsung	777
Kesehatan	1,338
Perumahan	1,482
Pendidikan	1,527
Aset/kepemilikan/daya beli	2,134
Kualitas lingkungan tempat tinggal	2,189
Kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan	2,640
Akses pelayanan	2,760
Penghargaan dan kepercayaan	3,140

Tabel 13. Skor Likert Prioritas Bantuan Langsung Daerah Kumuh

PRIORITAS KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	SKOR LIKERT
Kebutuhan akan bantuan langsung	340
Pendidikan	513
Kesehatan	518
Perumahan	700
Kualitas lingkungan tempat tinggal	818
Aset/kepemilikan/daya beli	1,013
Kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan	1,015
Akses pelayanan	1,087
Penghargaan dan kepercayaan	1,185

Tabel 14. Skor Likert Prioritas Kebutuhan Rumah Tangga
Daerah Bantaran Kali

PRIORITAS KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	SKOR LIKERT
Kebutuhan akan bantuan langsung	215
Perumahan	367
Kesehatan	385
Pendidikan	531
Aset/kepemilikan/daya beli	648
Kualitas lingkungan tempat tinggal	671
Kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan	790
Akses pelayanan	834
Penghargaan dan kepercayaan	966

Tabel 15. Skor Likert Prioritas Kebutuhan Rumah Tangga Daerah Pesisir

PRIORITAS KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	SKOR LIKERT
Kebutuhan akan bantuan langsung	222
Perumahan	415
Kesehatan	435
Aset/kepemilikan/daya beli	473
Pendidikan	483
Kualitas lingkungan tempat tinggal	700
Kualitas interaksi sosial budaya dan keamanan	835
Akses pelayanan	839
Penghargaan dan kepercayaan	989

Frequencies (Keseluruhan)**Statistics**

art_04

N	Valid	400
	Missing	0

art_04

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	228	57.0	57.0	57.0
	1.00	136	34.0	34.0	91.0
	2.00	28	7.0	7.0	98.0
	3.00	7	1.8	1.8	99.8
	4.00	1	.3	.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

Frequencies (Wilayah Pemukiman Kumuh)**Statistics**

art_04

N	Valid	160
	Missing	0

art_04

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	94	58.8	58.8	58.8
	1.00	52	32.5	32.5	91.3
	2.00	11	6.9	6.9	98.1
	3.00	2	1.3	1.3	99.4
	4.00	1	.6	.6	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Frequencies (Wilayah Bantaran Sungai)

Statistics

art_04

N	Valid	120
	Missing	0

art_04

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	72	60.0	60.0	60.0
	1.00	39	32.5	32.5	92.5
	2.00	8	6.7	6.7	99.2
	3.00	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Frequencies (Daerah Pesisir)

Statistics

art_04

N	Valid	120
	Missing	0

art_04

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	62	51.7	51.7	51.7
	1.00	45	37.5	37.5	89.2
	2.00	9	7.5	7.5	96.7
	3.00	4	3.3	3.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Frequencies (Keseluruhan)**Statistics**

art_517

N	Valid	400
	Missing	0

art_517

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid .00	73	18.3	18.3	18.3
1.00	137	34.3	34.3	52.5
2.00	97	24.3	24.3	76.8
3.00	54	13.5	13.5	90.3
4.00	22	5.5	5.5	95.8
5.00	10	2.5	2.5	98.3
6.00	4	1.0	1.0	99.3
7.00	2	.5	.5	99.8
11.00	1	.3	.3	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Frequencies (Wilayah Pemukiman Kumuh)**Statistics**

art_517

N	Valid	160
	Missing	0

art_517

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	11	6.9	6.9	6.9
	1.00	64	40.0	40.0	46.9
	2.00	45	28.1	28.1	75.0
	3.00	20	12.5	12.5	87.5
	4.00	9	5.6	5.6	93.1
	5.00	6	3.8	3.8	96.9
	6.00	3	1.9	1.9	98.8
	7.00	1	.6	.6	99.4
	11.00	1	.6	.6	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Frequencies (Wilayah Bantaran Sungai)**Statistics**

art_517

N	Valid	120
	Missing	0

art_517

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	35	29.2	29.2	29.2
	1.00	39	32.5	32.5	61.7
	2.00	21	17.5	17.5	79.2
	3.00	17	14.2	14.2	93.3
	4.00	6	5.0	5.0	98.3
	5.00	1	.8	.8	99.2
	7.00	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Frequencies (Daerah Pesisir)

Statistics

art_517

N	Valid	120
	Missing	0

art_517

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	27	22.5	22.5	22.5
	1.00	34	28.3	28.3	50.8
	2.00	31	25.8	25.8	76.7
	3.00	17	14.2	14.2	90.8
	4.00	7	5.8	5.8	96.7
	5.00	3	2.5	2.5	99.2
	6.00	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Wilayah Pemukiman Kumuh

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
income_k	160	.00	1200.00	498.2813	220.81969	48761.335
income_l	160	.00	800.00	79.3750	171.69040	29477.594
Valid N (listwise)	160					

Wilayah Bantaran Sungai

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
income_k	120	.00	1200.00	443.9167	236.20617	55793.354
income_l	120	.00	2520.00	193.7500	407.79601	166297.584
Valid N (listwise)	120					

Daerah Pesisir

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
income_k	120	.00	1050.00	440.7083	210.98339	44513.990
income_l	120	.00	1300.00	202.6667	321.88647	103610.896
Valid N (listwise)	120					

Keseluruhan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
income_k	400	.00	1200.00	464.7000	223.83625	50102.667
income_l	400	.00	2520.00	150.6750	309.28192	95655.308
Valid N (listwise)	400					

Discriminant**Tests of Equality of Group Means**

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
A	,981	3,827	2	397	,023
B	,928	15,510	2	397	,000
C	,997	,583	2	397	,558
D	,943	11,953	2	397	,000
E	,917	18,065	2	397	,000
F	,937	13,416	2	397	,000
G	,996	,718	2	397	,488
H	,955	9,335	2	397	,000
I	,974	5,216	2	397	,006

Stepwise Statistics**Variables Entered/Removed(a,b,c,d)**

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	E	,100	2,00 and 3,00	6,027	1	397,000	,015
2	D	,338	2,00 and 3,00	10,112	2	396,000	5,212E-05
3	A	,482	1,00 and 3,00	10,972	3	395,000	6,184E-07
4	B	,611	2,00 and 3,00	9,091	4	394,000	4,943E-07
5	I	,749	1,00 and 3,00	10,171	5	393,000	3,547E-09
6	H	,811	2,00 and 3,00	8,012	6	392,000	3,596E-08

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

- a Maximum number of steps is 18.
- b Maximum significance of F to enter is .05.
- c Minimum significance of F to remove is .10.
- d F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Wilks' Lambda

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	,917	1	2	397	18,065	2	397,000	,000
2	2	,866	2	2	397	14,747	4	792,000	,000
3	3	,823	3	2	397	13,455	6	790,000	,000
4	4	,744	4	2	397	15,710	8	788,000	,000
5	5	,721	5	2	397	13,969	10	786,000	,000
6	6	,690	6	2	397	13,329	12	784,000	,000

Pairwise Group Comparisons(a,b,c,d,e,f)

Step	LOKASI		1,00	2,00	3,00
1	1,00	F		35,394	11,055
		Sig.		,000	,001
	2,00	F	35,394		6,027
		Sig.	,000		,015
	3,00	F	11,055	6,027	
		Sig.	,001	,015	
2	1,00	F		17,785	15,837
		Sig.		,000	,000
	2,00	F	17,785		10,112
		Sig.	,000		,000
	3,00	F	15,837	10,112	
		Sig.	,000	,000	
3	1,00	F		18,977	10,972
		Sig.		,000	,000
	2,00	F	18,977		10,260
		Sig.	,000		,000
	3,00	F	10,972	10,260	
		Sig.	,000	,000	
4	1,00	F		25,675	12,687
		Sig.		,000	,000
	2,00	F	25,675		9,091
		Sig.	,000		,000

5	3,00	F	12,687	9,091	
		Sig.	,000	,000	
	1,00	F		22,542	10,171
		Sig.		,000	,000
6	2,00	F	22,542		9,639
		Sig.	,000		,000
	3,00	F	10,171	9,639	
		Sig.	,000	,000	
	1,00	F		21,386	11,019
		Sig.		,000	,000
	2,00	F	21,386		8,012
		Sig.	,000		,000
	3,00	F	11,019	8,012	
		Sig.	,000	,000	

a 1, 397 degrees of freedom for step 1.

b 2, 396 degrees of freedom for step 2.

c 3, 395 degrees of freedom for step 3.

d 4, 394 degrees of freedom for step 4.

e 5, 393 degrees of freedom for step 5.

f 6, 392 degrees of freedom for step 6.

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,335(a)	79,5	79,5	,501
2	,086(a)	20,5	100,0	,282

a First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 2	,690	146,484	12	,000
2	,921	32,636	5	,000

Structure Matrix

	Function	
	1	2
E	,521(*)	,029
B	-,475(*)	,176
A	-,240(*)	-,014
G(a)	,014(*)	,012
D	-,139	,790(*)
F(a)	-,172	,524(*)
I	,128	,491(*)
H	,327	-,360(*)
C(a)	-,007	-,065(*)

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions. Variables ordered by absolute size of correlation within function.

* Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function

a This variable not used in the analysis.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function	
	1	2
A	-,174	-,067
B	-,087	,001
D	,039	,233
E	,219	,055
H	,074	-,058
I	,064	,131
(Constant)	-3,173	-6,589

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids

LOKASI	Function	
	1	2
1,00	-,652	,137
2,00	,719	,257
3,00	,150	-,440

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Classification Statistics

Prior Probabilities for Groups

LOKASI	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
1,00	,333	160	160,000
2,00	,333	120	120,000
3,00	,333	120	120,000
Total	1,000	400	400,000

Classification Results(b,c)

		LOKASI	Predicted Group Membership			Total
			1,00	2,00	3,00	
Original	Count	1,00	101	25	34	160
		2,00	15	69	36	120
		3,00	32	33	55	120
	%	1,00	63,1	15,6	21,3	100,0
		2,00	12,5	57,5	30,0	100,0
		3,00	26,7	27,5	45,8	100,0
Cross-validated(a)	Count	1,00	97	27	36	160
		2,00	15	68	37	120
		3,00	32	37	51	120
	%	1,00	60,6	16,9	22,5	100,0
		2,00	12,5	56,7	30,8	100,0
		3,00	26,7	30,8	42,5	100,0

a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

b 56,3% of original grouped cases correctly classified.

c 54,0% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Discriminant Stepwise Statistics

Variables Entered/Removed(a,b,c,d)

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	E	,594	,00 and 1,00	40,703	1	278,000	7,377E-10
2	B	1,317	,00 and 1,00	44,996	2	277,000	1,198E-17
3	A	1,534	,00 and 1,00	34,811	3	276,000	4,112E-19
4	I	1,727	,00 and 1,00	29,294	4	275,000	2,682E-20
5	H	1,867	,00 and 1,00	25,241	5	274,000	6,380E-21
6	D	2,029	,00 and 1,00	22,768	6	273,000	9,668E-22

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

a Maximum number of steps is 18.

b Maximum significance of F to enter is .05.

c Minimum significance of F to remove is .10.

d F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Wilks' Lambda

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	,872	1	1	278	40,703	1	278,000	,000
2	2	,755	2	1	278	44,996	2	277,000	,000
3	3	,725	3	1	278	34,811	3	276,000	,000
4	4	,701	4	1	278	29,294	4	275,000	,000
5	5	,685	5	1	278	25,241	5	274,000	,000
6	6	,666	6	1	278	22,768	6	273,000	,000

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,500(a)	100,0	100,0	,578

a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	,666	111,576	6	,000

Structure Matrix

	Function 1
E	,541
B	-,453
H	,272
A	-,238
I	,166
F(a)	-,140
D	-,065
G(a)	,040
C(a)	-,021

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions. Variables ordered by absolute size of correlation within function.

a This variable not used in the analysis.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function
	1
A	-,192
B	-,086
D	,087
E	,248
H	,058
I	,079
(Constant)	-4,322

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids

LOKASI	Function
	1
,00	-,610
1,00	,814

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Classification Statistics

Prior Probabilities for Groups

LOKASI	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
,00	,500	160	160,000
1,00	,500	120	120,000
Total	1,000	280	280,000

Classification Function Coefficients

	LOKASI	
	,00	1,00
A	,936	,662
B	,102	-,020
D	1,083	1,206
E	1,552	1,906
H	,258	,340
I	2,520	2,633
(Constant)	-68,018	-74,319

Fisher's linear discriminant functions

Classification Results(b,c)

		LOKASI	Predicted Group Membership		Total
			,00	1,00	
Original	Count	,00	121	39	160
		1,00	25	95	120
	%	,00	75,6	24,4	100,0
		1,00	20,8	79,2	100,0
Cross-validated(a)	Count	,00	120	40	160
		1,00	27	93	120
	%	,00	75,0	25,0	100,0
		1,00	22,5	77,5	100,0

a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

b 77,1% of original grouped cases correctly classified.

c 76,1% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Discriminant Stepwise Statistics

Variables Entered/Removed(a,b,c,d)

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	F	,387	,00 and 1,00	26,545	1	278,000	4,886E-07
2	B	,549	,00 and 1,00	18,742	2	277,000	2,323E-08
3	H	,693	,00 and 1,00	15,724	3	276,000	1,812E-09
4	E	,796	,00 and 1,00	13,498	4	275,000	4,653E-10
5	A	,920	,00 and 1,00	12,430	5	274,000	6,999E-11

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

a Maximum number of steps is 18.

b Maximum significance of F to enter is .05.

c Minimum significance of F to remove is .10.

d F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Wilks' Lambda

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	,913	1	1	278	26,545	1	278,000	,000
2	2	,881	2	1	278	18,742	2	277,000	,000
3	3	,854	3	1	278	15,724	3	276,000	,000
4	4	,836	4	1	278	13,498	4	275,000	,000
5	5	,815	5	1	278	12,430	5	274,000	,000

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,227(a)	100,0	100,0	,430

a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	,815	56,321	5	,000

Structure Matrix

	Function 1
F	,649
B	,546
H	-,468
D(a)	,424
E	-,400
A	,193
I(a)	,178
G(a)	,064
C(a)	,034

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions. Variables ordered by absolute size of correlation within function.

a This variable not used in the analysis.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function
	1
A	,136
B	,072
E	-,116
F	,140
H	-,087
(Constant)	-1,708

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids

LOKASI	Function
	1
,00	,411
1,00	-,548

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Classification Statistics

Prior Probabilities for Groups

LOKASI	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
,00	,500	160	160,000
1,00	,500	120	120,000
Total	1,000	280	280,000

Classification Function Coefficients

	LOKASI	
	,00	1,00
A	1,330	1,199
B	-,003	-,071
E	,845	,957
F	2,102	1,968
H	,386	,470
(Constant)	-34,137	-32,565

Fisher's linear discriminant functions

Classification Results(b,c)

		LOKASI	Predicted Group Membership		Total
			,00	1,00	
Original	Count	,00	104	56	160
		1,00	32	88	120
	%	,00	65,0	35,0	100,0
		1,00	26,7	73,3	100,0
Cross-validated(a)	Count	,00	102	58	160
		1,00	33	87	120
	%	,00	63,8	36,3	100,0
		1,00	27,5	72,5	100,0

a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

b 68,6% of original grouped cases correctly classified.

c 67,5% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Discriminant Stepwise Statistics

Variables Entered/Removed(a,b,c,d)

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	D	,217	,00 and 1,00	13,033	1	238,000	,000
2	I	,385	,00 and 1,00	11,516	2	237,000	1,686E-05
3	E	,498	,00 and 1,00	9,873	3	236,000	3,702E-06
4	A	,636	,00 and 1,00	9,427	4	235,000	4,394E-07
5	B	,726	,00 and 1,00	8,561	5	234,000	1,832E-07

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

a Maximum number of steps is 18.

b Maximum significance of F to enter is .05.

c Minimum significance of F to remove is .10.

d F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Wilks' Lambda

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	,948	1	1	238	13,033	1	238,000	,000
2	2	,911	2	1	238	11,516	2	237,000	,000
3	3	,888	3	1	238	9,873	3	236,000	,000
4	4	,862	4	1	238	9,427	4	235,000	,000
5	5	,845	5	1	238	8,561	5	234,000	,000

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,183(a)	100,0	100,0	,393

a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	,845	39,563	5	,000

Structure Matrix

	Function 1
D	,547
I	,533
E	,365
F(a)	,330
A	-,167
B	-,156
C(a)	-,144
H(a)	-,048
G(a)	,034

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions. Variables ordered by absolute size of correlation within function.

a This variable not used in the analysis.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function
	1
A	-,148
B	-,049
D	,181
E	,163
I	,158
(Constant)	-7,305

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids

LOKASI	Function
	1
,00	,426
1,00	-,426

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Classification Statistics

Prior Probabilities for Groups

LOKASI	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
,00	,500	120	120,000
1,00	,500	120	120,000
Total	1,000	240	240,000

Classification Function Coefficients

	LOKASI	
	,00	1,00
A	1,051	1,178
B	-,120	-,078
D	,908	,754
E	1,111	,972
I	2,730	2,596
(Constant)	-65,623	-59,401

Fisher's linear discriminant functions

Classification Results(b,c)

		LOKASI	Predicted Group Membership		Total
			,00	1,00	
Original	Count	,00	76	44	120
		1,00	39	81	120
	%	,00	63,3	36,7	100,0
		1,00	32,5	67,5	100,0
Cross-validated(a)	Count	,00	73	47	120
		1,00	40	80	120
	%	,00	60,8	39,2	100,0
		1,00	33,3	66,7	100,0

a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

b 65,4% of original grouped cases correctly classified.

c 63,8% of cross-validated grouped cases correctly classified.